

Daftar Isi ...

Pengantar Penulis -- v

Pengantar: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. -- vii

Pengantar: Prof. Dr. Moh. Mahmud MD -- xiv

Pengantar: Prof. Aidul Fitriciada Azhari -- xviii

Pengantar Penerbit -- xxii

Bab 1: Konsep Negara Hukum -- 1

A. Teori Negara Hukum *Rechtsstaat* -- 3

B. Teori Negara Hukum *Rule of Law* -- 7

C. Teori Negara Hukum Pancasila -- 10

D. Teori Pembagian Kekuasaan (Trias Politika) -- 15

E. Teori Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke -- 16

F. Teori Pembagian Kekuasaan Montesquieu -- 17

G. Teori Pembagian Kekuasaan di Indonesia -- 21

H. Problem Negara Hukum di Indonesia -- 23

Bab 2: Sejarah dan Pengadilan HAM -- 42

A. Pengertian HAM Menurut Pendapat Para Ahli -- 43

B. Perumusan HAM dalam Berbagai Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan -- 46

- C. Sejarah Perkembangan HAM -- 50
 - D. Sejarah Pengadilan HAM -- 53
 - E. Perkembangan Konsep tentang HAM -- 59
 - F. Konsep HAM Pemikiran Barat -- 60
 - G. Konsep HAM Pemikiran Sosialis -- 61
 - H. Konsep HAM Indonesia (Pancasila) -- 63
-

Bab 3: Pembahasan RUU tentang Keterlibatan DPR-RI dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc -- 65

- A. Draft RUU tentang Pengadilan HAM -- 65
 - B. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi -- 67
 - C. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi -- 70
 - D. Keterlibatan DPR-RI dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc -- 73
 - E. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Konflik Norma Mengenai Keterlibatan DPR-RI -- 77
-

Bab 4: Pembahasan RUU tentang Pengadilan HAM Berkaitan dengan Asas Retroaktif -- 90

- A. Draft RUU tentang Pengadilan HAM -- 90
 - B. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi -- 92
 - C. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi -- 95
 - D. Larangan Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Peraturan Perundang-undangan -- 100
 - E. Konflik Norma Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Peraturan Perundang-undangan HAM -- 105
-

Bab 5: Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dalam Sistem Peradilan Pidana di Negara Belanda -- 114

- A. Sistem Peradilan Pidana di Negara Belanda -- 115
- B. Peraturan Perundang-undangan tentang HAM di Negara Belanda -- 120
- C. Asas Berlaku Surut (Retroaktif) dalam Peraturan Perundang-undangan di Negara Belanda -- 126

D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat di Negara Belanda -- 128

E. Kasus Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat di Negara Belanda -- 135

Bab 6: Penutup -- 142

Daftar Pustaka -- 148

Tentang Penulis -- 157

Daftar Isi